

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Konflik agraria merupakan sebuah perselisihan yang terjadi dalam sengketa tanah. Konflik agraria di kabupaten Mesuji terjadi sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1940 pemerintah kolonial menunjuk kawasan register 45 menjadi kawasan Hutan Tanam Industri (HTI) dan kelompok hutan yang ada di dalamnya terdapat masyarakat adat dinyatakan menjadi hutan larangan Sungai Buaya. Pemerintah melakukan pengukuran tapal batas pada masa setelah kemerdekaan pada tahun 1986-1987(Ridho, 2016).

Pengukuran tapal batas tersebut diikuti dengan kegiatan penggusuran wilayah kawasan hutan register 45 dimana dalam proses penggusuran tersebut melibatkan tim tata batas tingkat II Lampung Utara. Kemudian pada tanggal 07 Oktober 1991 pemerintah mengeluarkan SK dari Menteri Kehutanan (Menhut). SK Menhut No. 688/Kpts-II/1991, dimana Departemen Kehutanan memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanam Industri (HPHTI) kepada PT Silva Inhutani Lampung seluas 35.500 Ha(Hutan et al., 2017).

Menteri kehutanan kembali mengeluarkan SK terbaru mengenai perluasan kawasan HTI pada tanggal 17 Febuari 1997. SK No. 93/Kpts-II/1997 tentang pemeberian hak pengusahaan HTI atas kawasan hutan yang semula 35.500 Ha menjadi 43.100 Ha. (Hutan et al., 2017). Bertambahnya luas kawasan register 45, memberikan dampak problem terkait batasan kawasan HTI register 45 dimana dalam perluasan kawasan tersebut terdapat lahan masyarakat adat Talang Batu seluas 7000 Ha dan lahan seluas 2.600 Ha milik masyarakat adat Talang Batin(Ridho, 2016).

Masyarakat adat tersebut merupakan masyarakat yang sudah ada dan mendiami kawasan hutan sejak tahun 1917-1918, masyarakat yang merasa lahan mereka diklaim oleh pihak perusahaan melalui SK yang dikeluarkan Menhut tidak terima dan masyarakat melakukan tuntutan kepada pemerintah untuk pengembalian lahan yang di klaim oleh perusahaan perkebunan. Pemerintah menerima tuntutan masyarakat mengenai pengembalian lahan, tetapi tidak memenuhi tuntutan dari masyarakat, pemerintah hanya mengabulkan 2. 300 Ha dari tuntutan pengembalian seluruh lahan yang di klaim oleh perusahaan (Astuti, n.d.).

Konflik agraria mulai muncul ketika kedua masyarakat adat tersebut mengklaim lahan yang di garap dan di kelola perusahaan perkebunan tersebut merupakan lahan milik masyarakat adat. Perampasan lahan oleh pemerintah dan perusahaan perkebunan tersebut membuat masyarakat yang menyebut dirinya sebagai masyarakat adat, terusir dari tempat tinggalnya. Padahal, bagi mereka tanah adalah syarat keberlanjutan kehidupan. Karena hal tersebut masyarakat kemabali menuntut pengembalian tanah adat pada masa pasca reformasi 1998(Astuti, n.d.).Akan tetapi penuntutan kembali hak-hak atas tanah oleh masyarakat adat ini direspon tindakan represif atau penolakan. Ironisnya perusahaan dan pemerintah menuduh masyarakat desa tersebut sebagai perambah hutan.

Gubernur Lampung melayangkan surat No. 522/1240/01/2004 mengenai klaim mengenai lahan kawasan hutan register 45 sebagai kawasan hutan larangan milik pemerintah pada 29 Juli 2004 silam. Pemerintah menganggap bahwa sebaga kawasan hutan produksi Sungai Buaya merupakan lahan pemerintah. Kemudian pada bulan Maret tahun 2010 desa Talang Batu di gusur oleh Pasukan Pengaman Masyarakat (PAM) Swakarsa perusahaan bersama dengan Brimob. Rumah –rumah masyarakat di robohkan dengan alat-alat berat. pada mulanya semua berjalan lancar namu pada penggusuran di bulan berikutnya yaitu bulan November 2010 terjadi kericuhan

dimana Tim Gabungan Perlindungan Hutan Provinsi Lampung terlibat baku hantam oleh masyarakat sekitar hingga menelan korban jiwa(Mahmudi, 2014).

Kejadian bermula ketika dalam aksi penggusuran tersebut masyarakat tidak terima dan berusaha menghalang-halangi proses penggusuran yang dilakukan oleh petugas sehingga terjadilah konflik antara kedua belah pihak dimana masyarakat pada saat itu mengamuk kepada petugas tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan pihak pemerintah, yang berusaha menghentikan penggusuran dengan menghadang tim dan membawa senjata tajam dan hendak menyerang, kemudian tim membalas dengan tembakan peluru hampa dan peluru karet kearah kerumuman.

Made Aste warga yang menjadi korban jiwa dan merengas nyawa ketika hendak menyerang aparat, Made Aste di tembak dibagian selakangan hingga tembus ke bagian perut ketika hendak menerjang salah satu aparat dan tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit, dan terdapat korban luka-luka lainnya yang dibawa ke rumah sakit. Korban meninggal merupakan masyarakat desa Pelita Jaya, setelah selesai memukul mundur masyarakat tim gabungan membongkar rumah-rumah masyarakat sehingga masyarakat terpaksa harus meninggalkan daerah tersebut dan mengungsi ke desa-desa terdekat(Mahmudi, 2014).

Permasalahan di Mesuji semakin rumit ketika ketika terbentuk perkampungan baru yang disebut perkampungan moro-moro di area kawasan HTI register 45. Pada tahun 1996-1997 para pendatang mendatangi kawasan tersebut dan mulai menebangi tanaman sengon dan tanaman hutan industri lainnya hingga kawasan tersebut gundul. Kemudian di tahun 1999 masyarakat semakin banyak berdatangan ke kawasan tersebut dan mulai mendirikan bangunan-bangunan

yang berasal dari berbagai daerah. Kemudian tanah di daerah tersebut di kapling-kapling dan di bagi sesama mereka(Rasyidi, 2017).

Kawasan register 45 pada saat itu masih menjadi bagian Kabupaten Tulang Bawang pemerintah sering menertibkan para pendatang tersebut. Pemerintah mengurus rumah-rumah masyarakat yang membangun di kawasan tersebut, akan tetapi masyarakat terus kembali berdatangan dan semakin banyak. Di tahun 2003 ratusan pendatang kembali membuka ratusan Ha lahan HTI kemudian mendirikan Desa Moro Seneng, Moro Dewe dan Moro-moro, mereka mendirikan pemukiman dan ladang singkong. Pemerintah kesulitan dalam menertibkan masyarakat tersebut dan Pada tahun 2006 pemerintah melakukan negosiasi kepada masyarakat setempat dengan kesepakatan seumur singkong, dimana mereka diberi kesempatan hingga panen singkong kemudian diharuskan meninggalkan kawasan HTI register 45(Rasyidi, 2017).

Kesepakatan tersebut tinggalah kesepakatan dimana masyarakat setempat belum habis masa panen singkong sudah menanam singkong lagi sehingga masa hingga panen singkong berakhir tak kunjung tiba masyarakat terus mengulur-ulur kesepakatan yang telah di buat bersama pemerintah hingga pada akhirnya tahun 2009 terbentuklah organisasi masa yang mengkoordinir kawasan sekitar menjadi lahan kapling-kapling dimana masyarakat yang hendak mendapatkan kaplingan tersebut di haruskan membayar 3 juta hingga 15 juta sesuai luas kapling yang diinginkan. Melihat adanya ketidak sesuain dalam kesepakatan dan realita tersebut akhirnya pada tahun 2010-2011 pemerintah gencar mengambil tindakan kembali menertibkan kawasan tersebut.

Penertiban tersebut dilakukan oleh tim gabungan perlindungan hutan yang kemudian kembali mengurus bangunan-bangunan yang di dirikan oleh masyarakat dan merobohkannya

hingga rata dengan tanah. Sekali lagi masyarakat terusir dari kawasan HTI tersebut, namun lagi-lagi masyarakat terus kembali karena merasa tanah yang mereka tinggali adalah milik mereka yang telah menjadi warisan turun temurun dan sebagian dari mereka merasa telah membeli tanah tersebut sehingga mereka enggan untuk meninggalkan kawasan itu.

Puncaknya di tahun 2011 masyarakat yang tidak terima tempat tinggal mereka di gusur berusaha membuat perlawanan (Rasyidi, 2017). Perlawanan masyarakat membentuk aksi blokade jalan Jalan Lintas Timur Sumatera, yang mana pada saat itu masyarakat bersatu menutup akses jalan yang menghubungkan provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan. Akibat aksi tersebut tim gabungan yang menertibkan kawasan itu berusaha memukul mundur masyarakat dengan menyiramkan gas air mata kepada kerumunan masyarakat hingga pada saat itu sementara waktu jalan yang menghubungkan dengan Sumatera Selatan tersebut tidak dapat di lintasi.

Konflik agraria khususnya di Mesuji sendiri tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan PT Silva saja akan tetapi pada kisaran tahun 2010 dan 2011 Mesuji sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja mengingat terjadi konflik perebutan tanah di beberapa titik dalam satu kawasan dan melibatkan pihak lain seperti kasus PT Barat Selatan Makmur Investindo dengan masyarakat Kangunan Dalam, Sri Tanjung, dan Nipah Kuning. Konflik tersebut tidak jauh berbeda dengan konflik yang terjadi antara PT Silva dengan masyarakat desa Talang Batu, Pelita Jaya, dan Moro-moro yang membuat situasi di Mesuji pada saat itu menjadi bersitegang dengan adanya konflik Vertikal perebutan lahan (Mukmin, 2016).

Konflik vertikal yang terjadi di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Lampung yang mencuta di tahun 2010 hingga 2011 merupakan konflik agraria yang berdampak luas (Mukmin, 2016). Seperti yang dirasakan masyarakat Desa Moro-moro yang mendapatkan pengabaian hak

konstitusional warga register 45 dalam hal hak-hak politik warga negara, hilangnya hak-hak anak, dan perjuangan yang diperjuangkan oleh masyarakat Moro-moro tak lain ialah perjuangan memperoleh hak hidup, serta perjuangan mendapatkan hak politik dalam pemilu.

Perjuangan Masyarakat Moro-moro Register 45 untuk mendapatkan hak politik sama halnya dengan memperjuangkan hak untuk hidup dan pengakuan secara resmi dari pemerintah. Masyarakat Moro-moro kemudian bersatu untuk melakukan demonstrasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Perjuangan mereka ini merupakan salah satu wujud dari partisipasi politik mereka untuk mengubah kebijakan dari pemerintah yang menurut mereka itu salah dan harus di benarkan. Masyarakat Desa Moro-moro melakukan sebuah perjuangan melalui gerakan sosial dimana gerakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan mempertahankan wilayah yang dirasa hak mereka.

Gerakan sosial yang di bentuk oleh masyarakat Desa Moro-moro melalui organisasi Persatuan Petani Moro-moro Way Serdang (PPMWS), dan organisasi yang bernama Aliansi Gerakan Reforma Agraria Ranting Moro-Moro atau bisa di sebut AGRA. Pada tanggal 10 Desember 2017, AGRA juga melakukan aksi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menuntut hak-hak masyarakat Register 45 seperti KTP Elektronik, hak kesehatan, dan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat Desa Moro-moro (Sihite, 2017).

AGRA merupakan salah satu bentuk partisipasi politik Register 45 untuk menuntut keadilan dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang bahwa setiap warga negara harus wajib mendapatkan hak-hak politik dan hak untuk hidup di dalam negara tersebut. Pemerintah tidak melakukan kebijakan yang sesuai dengan apa yang di maksud dengan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah seakan mempermainkan kebijakan tersebut demi kepentingan-kepentingan yang pemerintah inginkan, karena itulah masyarakat

Register 45 melakukan demonstrasi. Selama tinggal di kawasan Register 45, Warga Register 45 ini tidak mempunyai hak politik dikarenakan mereka tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih. Selama Pilkada, Warga Register 45 tidak terakomodasi dalam Pemilihan Umum maupun Pilkada Mesuji 2017 (Sihite, 2017).

Perjuangan menuntut keadilan tersebut terjadi karena inisiatif dari masing-masing ketua kelompok dari berbagai kecamatan. Ketua kelompok dari macam-macam kecamatan melakukan koordinasi untuk melakukan suatu aksi pada peringatan hari hak asasi manusia sedunia dan PPMWS menyuarkan tuntutan ke pemerintah Mesuji untuk melakukan perbaikan nasib rakyat terutama bagi kaum buruh dan kaum tani di perdesaan yang masih hidup dalam kemiskinan, dibatasi hak-hak politik dan hidup dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk.

Konflik yang telah berlangsung lama hingga belas tahun tersebut telah menimbulkan berbagai dampak seperti halnya kekerasan, pengususan dan pengabaian hak-hak konstitusional warga negara terutama bagi masyarakat Desa Moro-moro yang merupakan entitas masyarakat yang mengalami pengabaian hak-hak konstitusionalnya yang pada akhirnya berdampak signifikan bagi kehidupan mereka.

Konflik tersebut merupakan perseteruan yang melibatkan *corporate* dan negara akan tetapi dapat di pahami dari kasus-kasus diatas bawasannya masyarakatpun tidak tinggal diam atas perlakuan perusahaan maupun pemerintah terhadap mereka, dimana masyarakat berusaha melawan dengan membuat gerakan sosial untuk mempertahankan apa yang mereka anggap menjadi hak milik mereka. Mengingat ketika berbicara konflik agraria sama halnya membicarakan persoalan hidup dan sumber penghidupan manusia. Perebutan tanah berarti perebutan sumber makanan, sumber penghidupan bagi manusia. Maka dari itu orang akan rela

menumpahkan darah mengorbankan segalanya yang ada demi mempertahankan kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana tindakan kolektif aktor dalam konflik agraria di Desa Moro-moro, Kabupaten Mesuji.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana tindakan kolektif aktor dalam konflik agraria di Desa Moro-moro Kabupaten Mesuji?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini ialah :

Mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana tindakan kolektif aktor dalam konflik agraria di Desa Moro-moro Kabupaten Mesuji.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting kepada pihak yang di golongankan menjadi dua manfaat penelitian yaitu :

4.1 Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memperkaya studi tentang teori tindakan kolektif Charles Tilly.
- Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang dikaitkan dalam tema tindakan kolektif aktor.

4.2 Manfaat Praktis

- **Manfaat Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti untuk mampu mengidentifikasi masalah konflik dan suatu gerakan sosial dalam masyarakat serta memberikan pengalaman sebagai pelajaran hidup di kemudian hari dalam menyikapi suatu konflik.

- **Manfaat Bagi Pemerintah Mesuji**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terhadap masyarakat Desa Moro-moro.

- **Manfaat Bagi Masyarakat**

Berdasarkan temuan yang dapat di dapat dari penelitian ini akan menjadi temuan yang mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat Mesuji dalam aksi memperjuangkan kepentingan bersama.

5. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi yang di gunakan dalam suatu penjelasan umum serta peristiwa tertentu yang berisi uraian-uraian tentang istilah serta konsep terkait dengan penelitian yang di lakukan.

5.1 Tindakan Kolektif Aktor

Wahyudi berkata dalam bukunya yang berjudul *Formasi dan Sturktur Gerakan Sosial Petani* bahwa tindakan kolektif merupakan tindakan yang diawali dari sekelompok orang yang berkumpul kemudian mereka melakukan aksi atau tindakan secara bersama-sama. Tempat berkumpul yang dimaksudkan ialah dapat berupa kelompok, asosiasi, organisasi, institusi jaringan, dan semacamnya yang telah *well defined* (Wahyudi,2005:24). Sedangkan Tindakan Kolektif menurut Charles Tilly dalam tulisannya yang berjudul *From Mobilization to Revolution* dikatakan bahwa teroi tindakan kolektif merupakan teori yang mempelajari manusia dalam melakukan tindakan bersama untuk mengejar tujuan bersama (Charles Tilly,1978:14). Maka tindakan kolektif aktor merupakan sebuah tindakan yang sekelompok orang / aktor secara

bersama yang memiliki tujuan yang sama. Identifikasi aktor-aktor tersebut sesuai definisi aktor menurut Ritzer dalam Wulandari yang menyebutkan bahwa aktor-aktor adalah efek jaringan (2011:624)(Wulandari, 2017).

5.2 Konflik Agraria

Konflik agraria atau konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi (Bernhard Limbong 2012:66).

6. Metode Penelitian

Dengan penelitian yang akan dilakukan dengan mempertahankan tujuan penelitian yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus kolektif.

6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri menyajikan data dalam bentuk narasi, deskriptif dari hasil wawancara maupun observasi. Kemudian yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ialah proses penelitian yang menghasilkan hasil penelitian berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek dan perilaku yang diamati. Alasan lain mengapa menggunakan penelitian kualitatif mengingat pada umumnya permasalahan yang diangkat belum jelas, masih bersifat kompleks serta holistik, dari pada itu peneliti bermaksud ingin mendalami situasi sosial secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi tindakan kolektif aktor dalam konflik agraria tersebut (Sugiyono, 2015).

Metodologi kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

(Lexy J. Moleong, 2005:4). Pendekatan dapat diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh). Pada pendekatan ini tidak diperbolehkan untuk mengisolasi individu atau orang ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu juga untuk memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian kualitatif adalah mengamati orang di dalam lingkungannya, dapat berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang dunia sekitar (Arikunto:2013). Metode kualitatif ini digunakan untuk mengungkap dan memahami fenomena sosial yang terjadi (Anselm Strauss dan Imam Muttaqien, 2007:5).

6.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang terkait dengan tindakan kolektif aktor dalam konflik agraria di Desa Moro-moro Kabupaten Mesuji, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif studi kasus kolektif.

Studi kasus merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus (Creswell, 2007:73). Kasus yang dimaksud dalam pernyataan tersebut merupakan sebuah kejadian, proses, kegiatan program, ataupun satu atau beberapa orang. Dalam memahami isu atau permasalahan secara mendalam, peneliti harus melakukan penyelidikan dan eksplorasi terhadap satu atau beberapa kasus dalam jangka waktu tertentu dan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, atau laporan. Studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Robert, K.Yin,2015). Tujuan dari penelitian studi kasus adalah intinya hampir sama dengan metode historis hanya ditambahkan dengan observasi dan wawancara secara sistematis (Robert, K.Yin.2015).

Jenis bukti-bukti dalam metode studi kasus meliputi dokumen, peralatan, wawancara, observasi, dan dalam beberapa situasi dapat terjadi observasi partisipan dan manipulasi informal.

Mengingat dalam penelitian ini permasalahan yang terjadi dalam konflik agraria di Kabupaten Mesuji di Desa Moro-moro sangatlah kompleksitas maka penelitian “Tindakan Kolektif Aktor Dalam Konflik Agraria Di Desa Moro-Moro Kabupaten Mesuji”, menggunakan jenis penelitian studi kasus kolektif dimana studi kasus kolektif ini merupakan studi kasus yang mengilustrasikan suatu persoalan penting dari berbagai perspektif atau peristiwa kompleks. Kejadian atau peristiwa kompleks adalah kasus tidak berdiri sendiri, ada kasus lain, membandingkan, dan melihat keterkaitan.

Pada dasarnya pendekatan studi kasus kolektif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian *how* atau *why*, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer, untuk melacak peristiwa kontemporer. Pada metode studi kasus, peneliti focus kepada desain dan pelaksanaan penelitian (Robert, K.Yin, 2015). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk tetap holistik dan signifikan. Menurut Arikunto (2013), metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk menggambarkan dan mengidentifikasi tindakan kolektif aktor dalam konflik agraria di Desa Moro-moro Kabupaten Mesuji. Data yang diperoleh nantinya akan dideskripsikan dan digambarkan secara lebih jelas dan lebih mendalam. Pendekatan studi kasus ini digunakan oleh peneliti dikarenakan dalam teknik pengumpulan datanya lebih efektif untuk mendapatkan data dari subjek.

6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilaksanakan dalam proses pengambilan data, sumber-sumber dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan ditelitinya guna pembenaran dalam kenyataan penelitiannya. Lokasi yang dipilih peneliti ialah Kabupaten Mesuji, tepatnya di Desa Moro-moro, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Lokasi tersebut dipilih mengingat bahwa Kabupaten Mesuji merupakan daerah rawan konflik terutama dalam bidang agraria. Hal tersebut terlihat dari adanya konflik agraria yang terjadi di daerah tersebut dimana konflik bermula dari adanya *reclaiming* tanah yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat adat, yang kemudian menjadi konflik yang tidak berkesudahan dan merambat kedalam ranah yang semakin luas seperti yang terjadi di Desa Moro-moro sendiri yang mana mereka kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dan mencoba untuk terus bertahan di kawasan konflik pertanahan tersebut.



6.3 Teknik Penentuan Subyek

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu agar penentuan subjek menggunakan teknik ini dapat menentukan subjek yang sesuai dengan kasus penelitian yang sedang diteliti. Menentukan subjek peneliti memakai *purposive sampling* bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi yang diperlukan guna menjadi bahan rancangan dari teori yang ada (Moleong, 2007). Adapun pertimbangan untuk menentukan subjek penelitian antarlain :

- Ketua organisasi PPMWS

-Sekjen Moro-moro

- Aktivistis AGRA

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* tersebut karena yang bersangkutan dianggap mampu memberikan informasi yang signifikan kepada peneliti berkenaan dengan penelitian tindakan kolektif aktor dalam konflik agraria yang terjadi di Desa Moro-moro Kabupaten Mesuji.

6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dapat diperoleh menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara), observasi, dan dokumentasi. Peneliti sendiri merupakan instrumen kunci dimana peneliti disini yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Peneliti sendiri pula yang menentukan informan yang tepat untuk di wawancarai, kapan dan dimana wawancara dilakukan (Ahmad Rumlan, 2014). Pengumpulan data merupakan bagian paling terpenting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif proses pengambilan data dilakukan pada situasi yang fleksibel atau lebih

lentur dengan menekankan analisis yang induktif dan menggunakan data penelitian sebagai dasar pemahaman dasar. Teknik pengumpulan data antara lain:

-Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dan berinteraksi langsung dengan narasumber melalui kegiatan sosial antara kedua belah pihak (peneliti dan narasumber). Di dalam proses wawancara peneliti mencoba menelaah fenomena yang sedang diteliti dengan tanya jawab. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Desa Moro-moro terutama yang tergabung dalam organisasi PPMWS. Dengan menggunakan wawancara yang fleksibel dan tidak terstruktur guna memberikan kenyamanan terhadap informan agar peneliti dapat menggali lebih banyak informasi. Untuk itu proses pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan keperluan pemenuhan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Serta untuk mendapatkan kejelasan dan memantapkan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

-Observasi.

Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa lokasi, narasumber, fenomena atau peristiwa dalam bentuk gambar atau dokumentasi tambahan terkait penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati dan meninjau kondisi masyarakat Desa Moro-moro terutama organisasi PPMWS di lokasi penelitian,

- Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya atau monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014). Dokumentasi merupakan kelengkapan dalam penelitian karena berisi dokumen foto, catatan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari

informan yang bersangkutan hasil dari wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah aktor yang terlibat aksi gerakan sosial dalam konflik agraria di Desa Moro-moro Kabupaten Mesuji.

6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data lapangan model Miles dan Huberman, dimana temuan data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sesungguhnya. Data yang telah terkumpul berupa catatan lapangan, artikel, dokumen, gambar dan lain sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan diatas, maka dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas temuan data maka peneliti akan mengolah dan menguji data tersebut menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif ini berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisa peneliti akan dituangkan dalam kalimat dan paragraf serta memberikan gambaran tentang hasil data kemudian akan digambarkan secara sistematis agar dapat menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini terdiri dari tiga tahap yaitu :

- Reduksi data

Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal- hal yang pokok, difokuskan pada hal- hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah- milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

- Penyajian data

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti table, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakuka dalam bentuk uraian singkat, bagan , hubungan antar kategori dan sejenisnya.

- Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono. 2015).

6.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan validitas data yang menjadi derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat di laporkan oleh peneliti, dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada obyek penelitian. Keabsahan dilakukan sebagai upaya dalam membuktikan penelitian yang dilakukan benar-benar akurat dan ilmiah. Dalam penelitian ini uji keabsahan data menggunakan triangulasi, dimana triangulasi merupakan teknik pengujian kredibilitas yang menggunakan proses pengecekan data dari berbagai informan/narasumber dari berbagai waktu. Proses triangulasi data sendiri meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data. Triangulasi sumber merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan metode yang sama (Sugiyono, 2007:273).